

Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Amrillah^{1*}, M. Irwan², M. Firmansyah³,

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

*Corresponding Author: i2g019001@student.unram.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Metode Momen, Belanja Daerah, Pertumbuhan Daerah, Konvergensi Daerah</p>	<p>Belanja Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh belanja pegawai dan rendahnya belanja modal, serta capaian pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dinamis dengan pendekatan sistem generalized method of moments (Sys-GMM) untuk mengidentifikasi dampak dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan tingkat pertumbuhan sebelumnya namun dengan arah yang berbeda. Studi ini juga menemukan telah terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten dan kota.</p>
<p>Keywords: Method of Moments, Local Government Expenditure, Regional Growth, Regional Convergence</p>	<p>ABSTRACT <i>West Nusa Tenggara Regional Government expenditure is still dominated by personnel expenditure and low capital expenditure, as well as economic growth achievements that are not optimal. Therefore, this study aims to examine the impact of government spending on economic growth in West Nusa Tenggara Province. This research uses dynamic panel data regression with a generalized method of moments (Sys-GMM) system approach to identify the impact of government spending on economic growth. The research results show that economic growth is influenced by personnel spending, goods and services spending, capital spending, and previous growth rates, but in different directions. This study also found that there has been a convergence of economic growth between districts and cities.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah selain ukuran-ukuran penting lainnya seperti pengangguran, inflasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Syarat sebuah daerah untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi sebagaimana banyak disebutkan dalam banyak literatur yaitu mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dinikmati secara merata oleh penduduk suatu daerah. Akan tetapi, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih menjadi hambatan bagi beberapa daerah di Indonesia terutama Provinsi NTB. Kondisi ini dapat dilihat dari data BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di NTB secara rata-rata periode 2010-2020 berada di bawah nasional (Tabel 1). Hakikat APBD yang disusun oleh pemerintah daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di wilayahnya, sehingga setiap belanja dalam program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut. Belanja daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewi et al., 2017).

Kinerja APBD juga dipengaruhi oleh seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat trend yang terjadi di NTB, realisasi PAD tiga tahun terakhir (2020-2022) selalu di bawah target (Hak dan Marlina, 2023). Hal ini tentu akan berdampak pada kebijakan fiskal daerah. Kebijakan fiskal daerah berhubungan dengan pengeluaran (belanja) untuk mendorong pembangunan daerah yaitu dalam bentuk peningkatan proporsi dana APBD yang dialokasikan untuk belanja publik dan belanja modal (Sjafrizal, 2018). Sejalan dengan pernyataan tersebut Bank Dunia tahun 2011 merekomendasikan kepada Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja badan pemerintah karena apabila belanja modal dilakukan secara bijaksana akan dapat memberikan efek pengganda (multiplier) pada perekonomian Indonesia (Halim, 2016). Kondisi ini berbeda dengan kenyataan, adanya dominasi belanja tak langsung yang berupa belanja

pegawai masih sangat melekat di anggaran belanja negara maupun pada belanja daerah (Nourmanita, 2016). Struktur belanja dalam realisasi APBD 2016 di 10 kabupaten/kota di NTB menunjukkan pengeluaran terbesar pemerintah daerah masih untuk belanja pegawai (Primadianti & Sugiyanto, 2020). Hasil temuan Primadianti & Sugiyanto (2020) juga diperkuat oleh data Alokasi APBD Pemerintah Provinsi NTB yang menunjukkan struktur belanja Pemerintah Provinsi NTB masih didominasi oleh belanja pegawai.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonom Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Tahun 2011-2020

Tahun	NTB	Indonesia
2011	-3.91	6.16
2012	-1.54	6.16
2013	5.16	5.74
2014	5.17	5.21
2015	21.76	4.88
2016	5.81	5.03
2017	0.09	5.07
2018	-4.50	5.17
2019	3.90	5.02
2020	-0.64	-2.07
Rata-rata	3.13	4.64

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Porsi belanja pegawai pada tahun 2019 dan 2020 menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 31,74 persen dan 30,59 persen dari total belanja Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya, porsi kedua ditempati oleh belanja hibah sebesar 29,07 persen tahun 2019 dan menurun ditahun 2020 menjadi 25,25 persen. Porsi ketiga yaitu belanja barang dan jasa yang porsinya hampir sama yaitu 23,27 persen pada tahun 2019 dan naik sedikit ditahun 2020 menjadi 23,71 persen. Belanja modal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah hanya sebesar 15,31 persen tahun 2019 dan menurun ditahun 2020 menjadi 13,34 persen. Sebagaimana telah disampaikan (Halim, 2016), belanja modal mempunyai dampak jangka Panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan

belanja pegawai yang mempunyai dampak yang lebih pendek.

Sejatinya kebijakan desentralisasi fiskal yang telah digulirkan pascareformasi diharapkan menjadi jalan keluar bagi tercapainya efisiensi, efektivitas tata kelola, stabilitas makro ekonomi, mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antarwilayah dan diharapkan memberikan dampak pada maksimisasi pertumbuhan ekonomi, serta mampu mereduksi kemiskinan dan ketimpangan antarpenduduk (Juanda & Heriwibowo, 2016). Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah daerah tidak cermat dalam mengalokasikan setiap belanjanya sehingga diharapkan dapat terwujud belanja daerah yang berkualitas sebagaimana digariskan pada PP No. 58 Tahun 2005 pasal 4.

Penelitian tentang pengeluaran pemerintah di sektor publik, dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Namun masih menunjukkan hasil yang beragam dengan proxy pengukuran variabel, dan metode pendekatan yang berbeda. Penelitian (Shina, 2016) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan persamaan simultan data panel dinamis menggunakan metode GMM Arellano-Bond untuk mengestimasi pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan (Shina, 2016) menunjukkan pengeluaran pemerintah yang diukur dengan total belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan penelitian (Pratama & Utama, 2019) di Provinsi Bali tahun 2011-2017 dengan menggunakan regresi data panel model tetap (fixed effect model). Namun demikian, Penelitian (Mukarramah et al., 2019) di Kabupaten Aceh Timur memiliki hasil yang berbeda. Penelitian (Mukarramah et al., 2019) dengan menggunakan analisis jalur menemukan belanja modal tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengukuran pengeluaran pemerintah secara agregat sebagaimana yang dilakukan (Shina, 2016), dan (Pratama & Utama, 2019) bisa menimbulkan hasil penelitian yang bias, karena komponen pengeluaran yang berbeda

dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara yang berbeda (Olaoye et al., 2019). Pernyataan ini dikuatkan oleh penelitian (Olaoye et al., 2019) yang dilakukan di 15 negara yang tergabung dalam Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dengan mengadopsi sistem GMM melalui penerapan kerangka PVAR dinamis.

Menurut Sasmal et al. (2016), volume dan sifat belanja publik berbeda di negara bagian yang berbeda. Efektivitas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sangat tergantung pada di mana uang tersebut dibelanjakan dan seberapa efisien dana tersebut digunakan. Temuan (Sukomo, 2018) di Jawa Barat periode 2005-2015 dengan pendekatan fixed effect model data panel menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Temuan (Prasetyia et al., 2011) turut mengkonfirmasi temuan tersebut. Namun, hasil yang sebaliknya ditunjukkan oleh belanja fungsi kesehatan dan pendidikan karena mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan.

Temuan (Olaoye et al., 2019) tidak mendukung hipotesis Wagner tentang pengeluaran pemerintah dan teori Keynesian tentang pengeluaran publik. Pengeluaran pemerintah yang diukur secara agregat dalam penelitiannya tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak didukungnya teori Keynesian dan hipotesis Wagner menurut (Olaoye et al., 2019) juga dimungkinkan disebabkan oleh penelitiannya hanya berfokus pada hubungan bivariat sederhana dan tidak mempertimbangkan dampak variabel makro ekonomi dan kelembagaan lainnya yang dapat memengaruhi pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi serta pola kausalitas di antara keduanya.

Teori Keynesian tentang pengeluaran publik menyatakan dalam jangka pendek, kebijakan fiskal yang aktif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah, berdampak pada permintaan dan mengarah pada peningkatan pendapatan atau kegiatan ekonomi di suatu negara melalui efek pengganda (multiplier) dan akselerator. Sedangkan, hipotesis Wagner

tentang hukum pengeluaran publik menyatakan pengeluaran pemerintah disebabkan oleh meningkatnya permintaan barang publik dan kontrol eksternalitas, oleh karena itu kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah (Olaoye et al., 2019).

Hasil penelitian (Shina (2016) dan (Olaoye et al. (2019) telah mengkonfirmasi adanya efek pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian (Lubis, 2013) di 18 Provinsi di Indonesia dengan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM).

Berdasarkan fenomena empiris tersebut di atas yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan proporsi belanja pemerintah yang masih didominasi oleh belanja pegawai maka penelitian ini perlu dilakukan. Alasan lain tentang pentingnya penelitian ini adalah (1) pentingnya mengakomodir heterogenitas wilayah (Guo et al., 2019), (Maipita et al., 2012) dan (Rahayu, 2020) yang dalam data panel telah terakomodir. (2) Adanya perbedaan efek pengaruh pada berbagai jenis belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana rekomendasi (Olaoye et al., 2019) yang dalam beberapa penelitian masih jarang diakomodir. (3) Variabel ekonomi banyak bersifat dinamis (Baltagi, 2005) artinya besarnya dipengaruhi oleh variabel tersebut dimasa lalu seperti pertumbuhan ekonomi (Lubis, 2013), (Olaoye et al., 2019) dan (Shina, 2016). Akhirnya, untuk mengahiri bab ini, kami menyampaikan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya dan belanja pemerintah daerah yang diwakili oleh belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa serta belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan apakah terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi NTB. Harapan kami, hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan fiskal di daerah baik pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat.

2. METODOLOGI

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2010). Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengukur kekuatan hubungan serta menunjukkan arah hubungan (Kuncoro 2011: 19). Model yang dikembangkan pada penelitian ini akan mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara belanja pemerintah sebagai variabel independent dan pertumbuhan ekonomi dengan proxy PDRB sebagai variabel Dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi panel dinamis dengan pendekatan sistem generalized method of moments (Sys-GMM) yang dikembangkan oleh (Blundell & Bond, 1998) yang merupakan pengembangan dari first differences generalized method of moments (FD-GMM) yang dikembangkan oleh Arellano-Bond (1991). Pendekatan yang pertama yaitu Sys-GMM lebih efisien dibandingkan pendekatan kedua FD-GMM (Arellano and Bover, 1995). Model pada penelitian ini mengacu pada penelitian (Lubis, 2013), (Sasmal et al., 2016), (Seran, 2017), (Ishak, 2017), (Mustaqimah et al., 2018), (Sukomo, 2018), (Olaoye et al., 2019), dan (Primadianti & Sugiyanto, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Estimasi Model Penelitian

Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi NTB ditunjukkan oleh persamaan ke-4 dan Tabel 2. Hasil estimasi model menunjukkan terdapat 4 variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi NTB. Keempat variabel tersebut adalah lag PDRB, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan, variabel belanja hibah, dan bantuan sosial tidak memengaruhi besaran dari PDRB.

Uji kriteria model

Uji validitas instrumen dengan Uji Sargan menunjukkan p-value = 0,76218 > 0,05 menunjukkan tidak tolak H0: instrument valid. Hasil uji konsistensi menunjukkan m1 atau Autocorrelation test (1): normal = -1.132773 (p-value = 0.25731) tolak H0 dan m2 atau Autocorrelation test (2): normal = 1.673328 (p-value = 0.094263) artinya tolak H0 atau model konsisten.

Nilai koefisien lag log PDRB pada model Sistem GMM sebesar 0,947 lebih besar dari koefisien lag log PDRB pada model FEM yaitu sebesar 0,416 dan lebih kecil dari koefisien

lag log PDRB pada model Pooled yaitu sebesar 0,951. Artinya, model dengan Sistem GMM pada penelitian ini memenuhi kriteria ketidakbiasan. Model ini lebih baik dari pada model FD GMM yang tidak memenuhi unsur ketidakbiasan.

$$\ln PDRB_{it} = 0.947 \ln PDRB_{i,t-1} + 0.071 \ln Pegawai_{it} - 0.001 \ln Hibah_{it} - 0.001 \ln Bansos_{it} - 0.040 \ln BarJas_{it} + 0.030 \ln Modal_{it} + u_{it} \dots\dots\dots(4)$$

Tabel 2 Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB

Variabel	Koefisien				Jangka Panjang Sys-GMM
	Fixed Effect	Pooled LS	FD-GMM	Sys-GMM	
$\ln PDRB_{i,t-1}$	0.416040***	0.9512873***	0.386714***	0.94731376***	-
$\ln Pegawai_{it}$	0.110139	0.0707127**	0.119034	0.07066367***	1.341217
$\ln Hibah_{it}$	0.014713	-0.0018986	0.016227***	-0.00083819	-0.015909
$\ln Bansos_{it}$	-0.010513	-0.0016001	-0.017642	-0.00142571	-0.027060
$\ln BarJas_{it}$	0.068477	-0.0016001	0.074566***	-0.04050133***	-0.768727
$\ln Modal_{it}$	0.049258	0.0305959	0.048934**	0.03054259**	0.579707
Uji Sargan	-	-	p-value = 1	p-value = 0.76218	Conv =
m1	-	-	p-value = 0.17974	p-value = 0.25731	0.054125
m2	-	-	p-value = 0.23983	p-value = 0.094263	

Keterangan: Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Sumber: Hasil Olah Data

Interpretasi Koefisien Model

Koefisien lag PDRB, belanja pegawai dan modal bernilai positif dan signifikan. Artinya kenaikan PDRB tiap-tiap kabupaten kota di NTB dipengaruhi oleh besaran nilai PDRB periode sebelumnya, belanja pegawai dan belanja modal. Besaran nilai koefisien lag PDRB kurang dari 1 juga menunjukkan telah terjadi konvergensi antar daerah di Provinsi NTB.

Ketiga koefisien sisanya bernilai negatif namun hanya belanja barang dan jasa bernilai signifikan. Artinya belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pada penelitian ini berdampak negatif terhadap besaran PDRB.

Pembahasan Hasil

Penelitian Pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu pemerintah

menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan pemerintah di masa depan.

Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Periode Sebelumnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan besaran pendapatan (PDRB) periode sebelumnya memengaruhi pendapatan. Temuan penelitian ini mendukung temuan (Lubis, 2013) di delapan provinsi di Indonesia periode 2007-2012, dan (Hutahaean, 2019) di Indonesia Periode 2004-2015. Lubis dalam penelitiannya menyimpulkan pertumbuhan ekonomi yang diproyksikan dengan PDRB (periode t) dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya yang diperoxikan dengan PDRB periode sebelumnya (periode t-1). Begitu juga Hutahaean, dalam penelitiannya menyimpulkan fluktuasi PDB konstan di masa sebelumnya secara konsisten menjadi faktor dominan yang

membentuk PDB konstan di masa mendatang. Temuan ini juga mendukung temuan sebelumnya dari (Olaoye et al., 2019) di Negara-negara ECOWAS. Dalam penelitian tersebut (Olaoye et al., 2019) juga sekaligus menguji kekokohan dan kesesuaian metode GMM dibandingkan kointegrasi panel biasa yang digunakan oleh studistudi sebelumnya.

Hasil temuan ini juga mengkonfirmasi teori pertumbuhan endogen. Model teori pertumbuhan endogen dengan menggunakan fungsi produksi sederhana, output (Y) merupakan fungsi dari persediaan modal (K) dimana akumulasi modal ditentukan oleh investasi dan tabungan (Mankiw, 2007). Lebih lanjut Mankiw menjelaskan tabungan dan investasi dalam model pertumbuhan endogen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Besarnya tabungan merupakan proporsi tertentu dari pendapatan (Falianty, 2019).

Shina (2016) dan Olaoye et al. (2019) telah mengkonfirmasi adanya efek pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian (Lubis, 2013) di 18 Provinsi di Indonesia dengan pendekatan Generalized Method of Moments (GMM).

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menguatkan pandangan bahwa belanja pegawai dapat menggerakkan ekonomi, tetapi hanya sesaat (Kanwil DJPb NTB, 2020). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dudzevičiūtė et al., 2018) untuk kasus Swedia dan Slovakia. Namun apakah pendekatan Keynesian benar-benar berlaku untuk jenis pengeluaran ini di NTB, perlu dilakukan uji lebih lanjut misalnya dengan uji kausalitas Granger seperti yang sudah dilakukan (Dudzevičiūtė et al., 2018).

Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan (Sasmal et al., 2016) di India. Perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh

pengukuran belanja pegawai yang dilakukan secara agregat yang mencakup banyak komponen non-produktif yang meliputi upah dan gaji, pensiun, subsidi dan tunjangan serta pembayaran bunga utang. Jika jenis belanja tersebut diurai menjadi lebih spesifik, beberapa komponen mungkin muncul sebagai faktor pendorong pertumbuhan (Sasmal et al., 2016). Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan (Ulfilianjani, 2014) pada penelitiannya di Provinsi Banten dengan menggunakan data panel terhadap 8 kabupaten dan kota periode 2009-2012. Temuan tersebut menunjukkan belanja pegawai selain tidak signifikan juga mempunyai kecenderungan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja Hibah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan belanja hibah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk hibah tidak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana temuan (Dudzevičiūtė et al., 2018) di Perancis, Belgia, Jerman, Portugal dan Siprus. Namun apakah pendekatan Wagnerian benar-benar berlaku untuk jenis pengeluaran ini di NTB, perlu dilakukan uji lebih lanjut misalnya dengan uji kausalitas Granger seperti yang sudah dilakukan (Dudzevičiūtė et al., 2018).

Pengelolaan belanja daerah yang mengedepankan kualitas belanja akan memberi efek multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Sumardjoko & Irwanto, 2015). Namun ketiadaan pengawasan dalam bentuk penggunaan secara khusus memungkinkan pemerintah daerah tidak terlalu fokus untuk mengarahkan pada kualitas belanja. Hal ini menyebabkan problem dalam penentuan penggunaan belanja daerah yang lebih mementingkan kompromi bersama antara eksekutif dan legislatif karena adanya selfinterest.

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga mengungkap bahwa pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial tidak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana temuan (Dudzevičiūtė et al., 2018) di Perancis, Belgia, Jerman, Portugal dan Siprus. Namun apakah pendekatan Wagnerian benar-benar berlaku untuk jenis pengeluaran ini di NTB, perlu dilakukan uji lebih lanjut misalnya dengan uji kausalitas Granger seperti yang sudah dilakukan (Dudzevičiūtė et al., 2018).

Pengaruh yang tidak signifikan belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi bisa juga disebabkan alokasi anggaran yang tidak signifikan. Bila diperhatikan nilai koefisien parameter yang negatif walaupun tidak signifikan mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan di antara kedua variabel ini. Data distribusi anggaran belanja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi NTB menunjukkan proporsi belanja bantuan sosial di semua kabupaten menurun dari tahun ke tahun dengan proporsi yang sangat kecil.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Maipita et al., 2010) transfer pemerintah kepada kelompok rumah tangga pedesaan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari pendapatan rata-rata sebenarnya pada masing-masing rumah tangga menyebabkan GDP riil menurun hingga 0.002 persen. Namun apabila dilihat secara sektoral, peningkatan jumlah transfer pendapatan ini memiliki dampak positif terhadap output pada beberapa sektor seperti agrikultur; utilitas publik (listrik, gas, dan air); transportasi dan telekomunikasi; dan keuangan; sewa menyewa, dan layanan bisnis. Sedangkan penurunan output terjadi pada sektor tambang dan galian; industri manufaktur; dan perdagangan, hotel, dan restoran.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi NTB. Artinya,

adanya peningkatan belanja barang dan jasa oleh pemerintah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten dan kota di NTB.

Pengaruh negatif belanja pemerintah daerah di tiap-tiap kabupaten dan kota di NTB untuk barang dan jasa terhadap pendapatan (PDRB) sama dengan pengaruh impor terhadap output (pendapatan). Mengikuti logika model Keynes di atas, diduga belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota di NTB dilakukan secara impor. Artinya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dilakukan dengan membeli dari luar daerah ataupun luar negeri. Mengetahui secara pasti penyebab ini maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Termasuk juga apakah pengeluaran pemerintah untuk belanja barang dan jasa di NTB dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebagaimana pendekatan Wagnerian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah (Azwar, 2016). Sehingga jenis belanja ini apabila semakin besar maka semakin tidak efisien (Wahyuni et al., 2017) dan dapat mengurangi kemampuan pembiayaan pemerintah yang lebih produktif. Oleh karena jenis belanja ini yang bersifat tidak produktif, walaupun bisa menggerakkan ekonomi namun bersifat jangka pendek (Kanwil DJPb NTB, 2020), serta fakta empiris yang memperlihatkan porsinya yang semakin besar dan bahkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di NTB negatif, maka evaluasi mengenai jenis belanja ini penting dilakukan.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dimana belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia (Amri, 2020). Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian (Ulfilianjani, 2014) yang menemukan belanja barang dan jasa oleh pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja modal merupakan investasi publik yang ditujukan untuk menambah kapasitas dan kualitas dari aset yang dimiliki suatu daerah sehingga alokasi belanja modal sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Nurhamidah & Suhartini, 2015). Hasil penelitian ini menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menerima hipotesis yang diajukan yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan (Ulfilianjani, 2014) (Deviani, 2016), (Sasmal et al., 2016), (Sumardjoko, 2017), dan (Scott-Joseph & Turner, 2019). Penelitian Deviani, (2016) yang dilakukan di Sumatera Barat, dan (Sumardjoko, 2017) pada 12 kabupaten dan kota di Indonesia yang dijadikan sampel menemukan bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian (Sasmal et al., 2016) di India menyebutkan peningkatan pada belanja modal yang diukur dengan belanja infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan perkapita di India. Begitu juga dengan penelitian (Scott-Joseph & Turner, 2019) di Uni Mata Uang Karibia Timur (ECCU) menemukan pengaruh belanja modal yang diukur dengan pengeluaran investasi pemerintah terhadap pertumbuhan sektoral (pertanian, manufaktur dan pertambangan) adalah positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Terdapat perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Prasetyia et al. (2011) yang meliputi 33 Provinsi di Indonesia, Badrudin (2012) di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 Kabupaten dan Kota periode 2004- 2008, Nurhamidah & Suhartini, 2015) di Sumatera Selatan dan Sukomo (2018).

Pada penelitian ini yang termasuk belanja modal terdiri atas (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja

modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya.

Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi

Masalah disparitas telah menjadi masalah global dan terjadi tidak hanya antar negara. Namun masalah ini secara historis dapat terjadi antar daerah dalam suatu negara dari level daerah tertinggi sampai level daerah terendah baik itu antar kecamatan (Amrillah & Yasa, 2013), kabupaten/kota (Primadianti & Sugiyanto, 2020), provinsi (Yuniasih et al., 2013), bahkan kepulauan (Firdaus, 2013).

Disparitas pendapatan antar daerah telah terjadi di provinsi NTB. Kondisi ini telah dikuatkan oleh data BPS selama periode 2010-2020 menunjukkan hal tersebut. Mengikuti model penelitian yang diajukan, mengurangi tingkat disparitas pendapatan perlu dilakukan intervensi pemerintah melalui belanja pemerintah di tiap-tiap kabupaten dan kota di NTB.

Data BPS menunjukkan variasi pendapatan perkapita di tiap-tiap kabupaten dan kota di NTB cukup tinggi. Tahun 2010 PDRB perkapita tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 157.487.000. Sedangkan PDRB perkapita terendah di Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing sebesar 5.412.000 dan 5.623.000.

Variasi yang sangat besar ini dipengaruhi oleh kontribusi sektor tambang terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa Barat yang sangat besar. Apabila kita mengeluarkan sektor tambang maka PDRB perkapita tertinggi di Kota Mataram dan PDRB perkapita terendah di Lombok Tengah yaitu masing-masing sebesar 11.987 ribu dan 5.410 ribu. Sehingga selisihnya menjadi sebesar 6.577 ribu pada tahun 2010. Demikian juga pada tahun 2020 PDRB perkapitan tertinggi masih di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 113.476 ribu. Sedangkan PDRB perkapit terendah ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 10.577 ribu. Artinya masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar namun dalam kondisi yang menurun antara daerah yang mempunyai PDRB perkapita tertinggi dengan daerah yang mempunyai PDRB perkapita terendah yaitu menjadi 102.899 ribu.

Konvergensi atau penyatuan kondisi ekonomi harus diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melihat data dari BPS tentang kondisi pendapatan perkapita kabupaten dan kota di NTB menunjukkan, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 terjadi konvergensi pendapatan (yang diproxikan dengan PDRB) antar kabupaten dan kota di NTB. Meskipun dari data tersebut telah menunjukkan adanya konvergensi, namun kecepatan konvergensinya bisa dikatakan masih rendah.

Hasil penelitian menunjukkan koefisien variabel lag PDRB sebesar 0.947 yang lebih kecil dari satu menunjukkan proses konvergensi PDRB telah terjadi antar kabupaten dan kota di NTB. Tingkat konvergensi sebesar 0,0541 artinya terjadi konvergensi sebesar 5,41 persen pertahun. Setiap tahun dengan asumsi tidak ada perubahan ataupun shok dalam perekonomian kabupaten dan kota di NTB akan terjadi konvergensi atau pengurangan kesenjangan PDRB antar kabupaten di Provinsi NTB sebesar 5,41 persen. Artinya dibutuhkan waktu selama 18,5 tahun bagi daerah yang memiliki PDRB terkecil untuk menutup kesenjangan (half time convergence) dan bisa menyusul daerah yang memiliki PDRB tertinggi.

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten dan kota di NTB. Belanja pegawai, dan belanja modal yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah kabupaten dan kota diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja barang dan jasa dapat menghambat bahkan mengurangi pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Mempercepat terjadinya konvergensi antar daerah di NTB, pemerintah daerah maupun pusat harus mengupayakan pertumbuhan yang lebih cepat pada kabupaten dan kota yang mempunyai pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten kota yang mempunyai pendapatan lebih tinggi dengan instrumen yang sudah disebutkan. Belanja modal direkomendasikan dilakukan terutama untuk membangun infrastruktur yang mampu mendorong peningkatan produktivitas di daerah yang berpendapatan rendah dan

diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Rekomendasi ini diberikan mengingat daerah yang belum berkembang mempunyai rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih rendah sehingga produktivitas marginal dari investasi setiap satuan modal lebih tinggi di wilayah yang kurang berkembang (Firdaus, 2013). Akibatnya pertumbuhan ekonomi di daerah yang belum berkembang dimungkinkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang sudah maju.

Temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan telah terjadi konvergensi terhadap pendapatan didukung pula oleh beberapa temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Firdaus & Yusop, 2009), (Firdaus, 2013) pada pengamatannya terhadap provinsi di Indonesia, (Yuniasih et al., 2013), (Nurhamidah & Suhartini, 2015). Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan tersebut terdapat pada kecepatan konvergensi yang terjadi. Misalnya saja pengamatan (Firdaus, 2013) menunjukkan kecepatan konvergensi antar provinsi di Indonesia sebesar 0,29 persen pertahun artinya proses *cacth up* akan terjadi, namun dalam periode yang sangat lama yaitu sekitar 200 tahun dan penelitian Nurhamidah & Suhartini (2015) menunjukkan dibutuhkan waktu 22 tahun untuk mengurangi setengah ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumsel. Sedangkan pada penelitian ini proses *cacth up* membutuhkan waktu yang lebih pendek yaitu sekitar 18,5 tahun.

Hasil berbeda dengan temuan dalam penelitian ini telah didapatkan oleh (Rustariyuni & Setyari, 2012) dan (Dekiawan, 2014). Tidak terjadinya konvergensi menurut (Rustariyuni & Setyari, 2012) disebabkan oleh perbedaan kontribusi dan pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi yang ada di tiap-tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali. Sedangkan menurut (Dekiawan, 2014), disebabkan oleh belum kuatnya keterkaitan antara pengeluaran pemerintah provinsi yang semakin konvergen dengan pendapatan perkapita. Pengeluaran pemerintah provinsi belum memberikan dampak yang merata pada pendapatan perkapita masing-masing sehingga masing-masing provinsi

memiliki kebijakan pengeluaran APBD yang variatif.

Hasil yang berbeda juga didapat dari temuan (Firdaus, 2013) ketika mengamati proses konvergensi antar kabupaten/kota di pulau Jawa dengan menggunakan data PDRB. Namun ketika menggunakan data pengeluaran rumah tangga, hasil yang berbeda didapatkan oleh (Firdaus, 2013). Kondisi ini menurut (Firdaus, 2013) disebabkan oleh aktivitas produksi di daerah-daerah di Jawa nilai tambahnya tidak kembali ke masyarakat lokal, melainkan dikirim ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

SIMPULAN

Menguji pengaruh belanja pemerintah secara agregat terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana disampaikan oleh (Olaoye et al., 2019) akan menghasilkan hasil yang bias karena setiap jenis belanja akan menghasilkan efek yang berbeda. Kondisi ini juga dibuktikan oleh temuan penelitian ini dimana hasilnya hanya belanja pegawai dan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja barang dan jasa memiliki dampak negatif. Dua jenis belanja lainnya yaitu belanja hibah dan bansos walaupun pengaruhnya tidak signifikan namun memiliki kecenderungan untuk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan periode sebelumnya yang juga turut diuji dalam penelitian ini dan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pengujian dengan memasukkan variabel lag pertumbuhan pendapatan ini juga bermanfaat untuk menguji apakah terjadi konvergensi dan hasilnya adalah telah terjadi konvergensi antar simpulan kabupaten dan kota di NTB. Dibutuhkan waktu selama 18,5 tahun bagi daerah yang memiliki PDRB terkecil untuk menutup kesenjangan dan menyamai daerah yang memiliki PDRB terbesar.

Implikasi Kebijakan

Pemerintah daerah dalam upayanya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan penting terus menjaga agar pertumbuhan yang tinggi itu tetap terjadi dengan

memperhatikan variabel utama yang berpengaruh yaitu belanja modal walupun belanja pegawai juga memiliki pengaruh yang positif namun dampaknya bersifat jangka pendek menurut beberapa literatur yang sudah dibahas dalam penelitian ini.

Porsi belanja modal perlu diperbesar dan dilakukan dengan prinsip efisien dalam penggunaan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Kajian tentang sektor ekonomi yang memiliki dampak rembesan kebawah (*trickle-down effect*) dan pengganda (*multiplier*) yang besar perlu dilakukan secara kontinyu bersama dengan akademisi dan pihak terkait termasuk DPRD sebelum memutuskan alokasi belanja yang akan ditetapkan dalam APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2020). Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. *AlMasharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(1), 1–18.
- Amrillah, A., & Yasa, I. (2013). Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Antar Kecamatan Dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(4), 181–189.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2). <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
- Dekiawan, H. (2014). Konvergensi Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi di Indonesia: Pendekatan Data Panel Dinamis Spasial. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 17(1), 99–128. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i1.52>
- Deviani. (2016). Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 1–13.

- Dewi, I., Paulus, S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5), 1–18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpek.d.15781.19.2.2017>
- Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A. (2018). Government expenditure and economic growth in the European Union countries. *International Journal of Social Economics*, 45(2), 372–386.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-122016-0365>
- Firdaus, M. (2013). Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. *Orasi Ilmiah*, 54.
- Firdaus, M., & Yusop, Z. (2009). Dynamic analysis of regional convergence in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 3(1), 73–86.
- Guo, Y., Zhou, Y., & Liu, Y. (2019). Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province. *Journal of Rural Studies*, January, 1–10.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.007>
- Hak, M. B. U., & Marlina, N. (2023). The Contribution of Regional Tax to Regional Original Income of West Nusa Tenggara Province in 2018-2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1).
- Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 15–28.
- Kanwil DJPb NTB, K. K. R. I. (2020). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020*.
https://djp.kemenkeu.go.id/portals/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2020/29-KFR_2020_NTB.pdf
- Lubis, K. A. (2013). Penerapan Generalized Method of Moments Pada Persamaan Simultan Panel Dinamis Untuk Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*.
- Maipita, I. (2012). Simulasi Pengeluaran Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Ekonomi Makro: Suatu Model Computable General Equilibrium. *Quantitative Economics Journal*, 1(2), 1–15.
<https://doi.org/10.24114/qej.v1i2.17403>
- Mukarramah, Yolanda, C., & Zulkarnain, M. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 105–117.
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2018). Peran Belanja Modal Pemerintah Dan Investasi Pembangunan Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 1–15.
<https://doi.org/10.29244/jekp.6.2.1-15>
- Nourmanita, N. A. (2016). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah Dan Efektivitas Anggaran Belanja. *Natapraja*, 4(1), 31–48.
<https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613>
- Nurhamidah, R., & Suhartini, A. M. (2015). Determinan Konvergensi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 71.
<https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.554>
- Olaoye, O. O., Orisadare, M., & Okorie, U. U. (2019). Government expenditure and economic growth nexus in ECOWAS countries. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 36(3), 204–225.
<https://doi.org/10.1108/jeas-012019-0010>
- Prasetyia, F., Wulandari, F., & Utama, R. S. (2011). Pengeluaran Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* (Vol. 11, Issue 2,

- pp. 99-116).
<https://doi.org/10.21002/jepi.v1i1i2.184>
- Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Koata Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651– 680.
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–20.
- Rahayu, H. C. (2020). Faktor Geografis dan Kelembagaan dalam Kemiskinan di Provinsi Riau: Analisis Panel Data di Tingkat Desa. *Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Rustariyuni, S. D., & Setyari, N. P. W. (2012). Konvergensi Perekonomian Di Bali: Inequality Sebagai Penyebab Kemiskinan. *Piramida*, 7(2), 1–23.
- Sasmal, R. S. J., R, S., & S, J. (2016). Public expenditure, economic growth and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 604–618.
- Scott-Joseph, A., & Turner, T. F. (2019). Does the composition of government expenditure matter for Eastern Caribbean economies' longrun sectoral output growth? : An ARDL bound test approach. *International Journal of Development Issues*, November 2016. <https://doi.org/10.1108/IJDI-012018-0011>
- Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 59–71. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i01.p07>
- Shina, A. F. I. (2016). Penerapan 2 SLS GMM-AB pada Persamaan Simultan Data Panel Dinamis untuk Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebagai Islamic Country. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.141-162>
- Sukomo. (2018). Analisis Kredit Perbankan dan Belanja Sektor Publik Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan PDRB, Kemiskinan dan Pengangguran di Jawa Barat Tahun 2005-2015. *Univesitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Sumardjoko, I., & Irwanto, A. (2015). Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan Quality Spending. *Simposium Nasional Akuntansi* 18, 1–23.
- Ulfilianjani, N. (2014). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Institut Pertanian Bogor*.
- Wahyuni, S., Juanda, B., & Fahmi, I. (2017). Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya dengan Kinerja Pembangunan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 16–31.
- Yuniasih, A. F., Firdaus, M., & Fahmi, I. (2013). Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Produktivitas Tenaga Kerja Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 63–81. <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/447>